

## **Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi**

**Arasy Ghazali Akbar<sup>1</sup>, Rosidi<sup>2</sup>, Wuryan Andayani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Brawijaya Indonesia

<sup>1</sup>*arasyghazali.a@gmail.com*, <sup>2</sup>*rosidi.mlg@gmail.com*, <sup>3</sup>*a\_wuryan@yahoo.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris efek moderasi budaya etis organisasi terhadap hubungan implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh 10 sampel OPD yang dianalisis dengan menggunakan *moderated regression analysis*. Hasil menunjukkan beberapa temuan, pertama implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kedua, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ketiga dan keempat menunjukkan bahwa budaya etis organisasi terdukung sebagai variabel moderasi.

**Kata Kunci:** *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah, budaya etis organisasi, pencegahan *fraud*.

## **The Impact of a Procurement Implementation and Government Internal Control System on Goods/Services Procurement Fraud Prevention by Using Organization Ethical Culture as a Moderating Variable**

### **Abstract**

This study aims to empirically examine and prove the organization's ethical culture moderating impact on the relationship between e-procurement implementation and the government's internal control system with fraud prevention in procuring goods and services. Based on the purposive sampling method, 55 obtained samples were analyzed by using moderated regression analysis. The results show several findings, first, implementation of e-procurement has a significant effect on fraud prevention. Second, the government's internal control system has a significant effect on fraud prevention. The third and fourth findings indicate that the organization ethical culture is supported as a moderating variable.

**Keywords:** e-procurement, government's internal control system, organization ethical culture, fraud prevention

### **PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui *e-procurement* merupakan salah satu jawaban atas optimisme akan Indonesia yang sejahtera dan terbebas dari korupsi. Melalui *e-procurement* diharapkan pemerintah selaku organisasi yang memberikan pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan menghindari kebocoran anggaran pada sektor pengadaan. Namun, penerapan *e-procurement* berbanding terbalik dengan fakta yang diungkapkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Secara fakta, terdapat peningkatan penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dari tahun 2016-2017 yang terdiri dari berbagai modus operandi. Berdasarkan data yang terhimpun bahwa

sudah terdapat 1101 tersangka yang terjerat pada tahun 2016 dan kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 1298 tersangka. Oknum yang terlibat ini juga beragam, mulai dari kontraktor hingga kepala daerah yang ikut andil dalam peningkatan jumlah tersangka tersebut.

Data yang diungkapkan ICW pada tahun 2017 menjadi antitesis penelitian yang dilakukan Udoyono (2012) yang menjelaskan bahwa melalui *e-procurement* dapat menekan tindakan penyalahgunaan anggaran negara sebesar 10-50%. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindakan kecurangan tetap tumbuh subur dengan atau tanpa adanya *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi fenomena menarik bagi peneliti untuk melakukan proses telaah lebih dalam terkait pencegahan *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian yang dilakukan Purwitasari (2013), Natasya (2017), Dewi (2017) dan Yuliana (2016) menjelaskan bahwa secara parsial maupun simultan pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Wicaksono (2017) dan Zakaria (2016) menunjukkan variabel SPI tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut disebabkan masih terdapatnya pengawasan yang buruk serta proses dokumentasi yang tidak tepat. Pada dasarnya kecurangan yang terjadi muncul akibat adanya kesempatan. Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang dikemukakan Karyono (2013:5) bahwa peluang kemungkinan terjadinya *fraud* biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem dan kurangnya pengawasan di dalam suatu organisasi. Untuk itu, dalam hal melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dimulai dengan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, manajemen dan karyawan lain untuk memberikan *asurances* yang memadai terkait terwujudnya tujuan suatu entitas yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi suatu operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan (Tuanakotta, 2012:350). Pengendalian internal yang tergolong baik akan lebih menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan *fraud*. Jika di dalam suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang kuat, tingkat *fraud* yang akan muncul dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* bahwa hal ini dikatakan dapat memperkecil ruang *fraud* karena SPI merupakan salah satu instrumen pemerintah yang memiliki *job desk* untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan di sektor publik (Tuanakotta, 2010:284)

Selain *e-procurement* dan sistem pengendalian internal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencegahan *fraud* yakni budaya etis organisasi. Budaya etis organisasi merupakan sistem nilai, norma dan kepercayaan yang pada dasarnya dimiliki oleh masing-masing individu pada sebuah organisasi (Artini, 2014).. Budaya yang etis kemudian dapat

mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi demi terciptanya perilaku yang beretika. Melalui budaya etis organisasi diharapkan dapat menangkal tindakan-tindakan yang dapat memicu kerugian bagi organisasi dan tidak kalah pentingnya ialah upaya mencegah pegawai melakukan praktik kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Karyono (2013:74) dalam bukunya yakni *forensic fraud* sebenarnya *fraud* dapat dicegah melalui penciptaan budaya/kultur etis atau jujur, keterbukaan serta pengeliminasian terkait kesempatan munculnya kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Salim (2016) yang melakukan penelitian terkait pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* dengan dimoderasi variabel komitmen organisasi. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi. Penggunaan variabel tersebut masih belum ditemukan pada penelitian sejenis terkait pencegahan *fraud* pengadaan di Indonesia. Selanjutnya, instrumen yang telah dimodifikasi dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Nuryanti (2015), oemarmadi (2009), Purwitasari (2013) dan Simbolon (2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi sebagai variabel independen terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai masalah mulai dari diskriminasi terkait persyaratan lelang, spesifikasi teknis yang lebih mengarah pada pengusaha tertentu, adanya istilah tender arisan serta yang tidak kalah penting yakni persekongkolan yang dilakukan oleh panitia tender dengan pihak pengusaha yang terkait (Yakobustefa, 2013). Hal tersebut mengindikasikan bahwa komitmen aparatur masih tergolong rendah di mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa SPI masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Terdapat dua kontribusi dalam penelitian ini yang di antaranya kontribusi teoretis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoretis pada penelitian ini yakni memberikan tambahan bukti pada *fraud triangle* dan *gone theory* bahwa melalui penerapan *e-procurement* dan SPIP dapat menjadi alat untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. Penelitian ini juga memberikan tambahan wawasan bagi akademisi serta memberikan bukti empiris pengaruh implementasi *e-procurement* dan SPIP pada pencegahan *fraud* dengan budaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi. Kontribusi praktis penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Lingga bahwa dengan menitikberatkan pada penciptaan budaya yang beretika dan jujur akan berdampak pada penguatan sistem dan regulasi mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam penelitian ini teori *fraud triangle* dan teori *gone* digunakan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori *fraud triangle* berpandangan bahwa untuk memerangi kecurangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem yang efektif serta bagaimana organisasi mampu mempertahankan budaya yang jujur dan beretika. Pandangan tersebut diperkuat oleh *gone theory* yang menjelaskan bahwa ruang lingkup *fraud* dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik di dalam suatu organisasi. Teori *gone* juga menjelaskan faktor lain yang menyebabkan munculnya motivasi untuk melakukan tindak kecurangan yakni faktor individu dan generik. Faktor individu berkaitan dengan kebutuhan dan keserakahan, sedangkan faktor generik

kesempatan dan pengungkapan yang belum maksimal dalam memberikan efek jera. Pada penelitian ini terdapat 4 macam jenis permasalahan. Pertama, apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kedua, apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Ketiga, apakah budaya etis organisasi memoderasi hubungan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Keempat, budaya etis organisasi memoderasi hubungan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud*.

Menggeliatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan memberikan kemudahan di berbagai aktivitas, salah satu di antaranya pada aktivitas pengadaan barang dan jasa. Seperti yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement* merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data terkait kegiatan pengadaan yang terdiri atas data pengadaan barang dan jasa yang berbasis internet. Melalui penerapan *e-procurement* diharapkan menjadi jawaban terkait permasalahan lemahnya sistem pada teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Karyono (2013:5) yang dapat menstimulasi berbagai tindakan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012) menjelaskan peran *e-procurement* telah berdampak pada penghematan anggaran serta sebagai sarana guna memperkecil ruang bagi para pelaku kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Artantri (2016) dan Danuta (2017) mengemukakan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang berdampak pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pemikiran logis yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H1: implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Merujuk pada teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Tuanakotta (2010:284) menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan *fraud* dapat dimulai melalui pengadopsian sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan respon untuk memitigasi berbagai risiko yang kemungkinan dapat muncul, sehingga melalui penerapan pengendalian manajemen diharapkan mampu mengatasi ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi serta dapat mendeteksi hal-hal semacam tindakan *fraud* secara dini (Soleman, 2013).

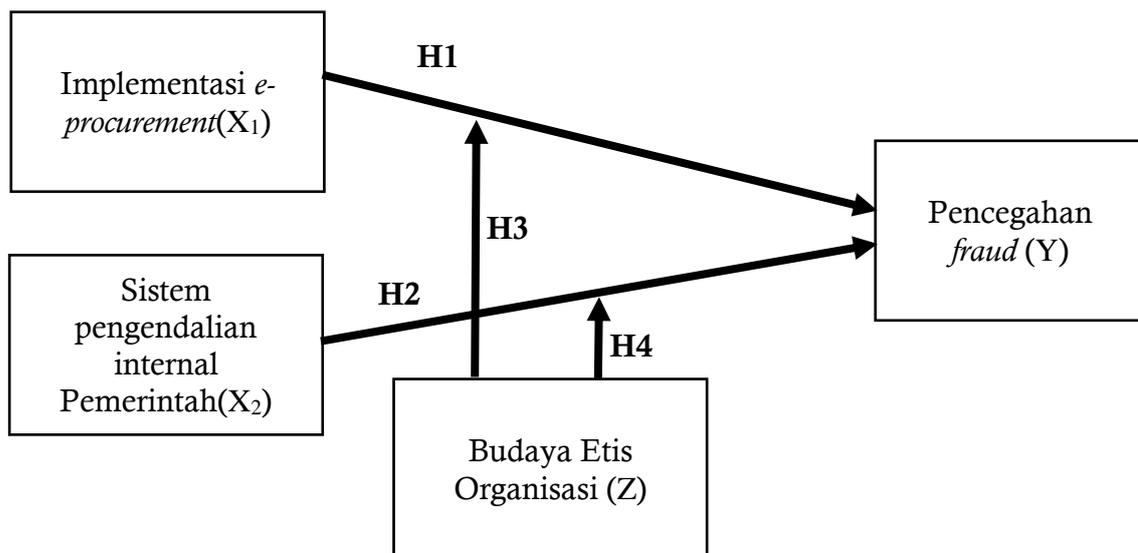
Penelitian yang dilakukan oleh Hermiyati (2010) terkait pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Indonesia menyimpulkan bahwa pengendalian internal dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan di lingkungan rumah sakit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) dan Dewi (2017) bahwa SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di sektor publik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pemikiran logis yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H2: sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Selain *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* yakni budaya etis organisasi. Melalui budaya etis organisasi, diharapkan dapat mempengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Apabila setiap anggota organisasi melaksanakan

tugas berdasarkan norma serta etika yang telah ditetapkan maka pengendalian internal dapat berjalan tanpa hambatan serta yang terpenting dapat berperan untuk memperkecil ruang bagi pelaku tindak kecurangan. Hal ini selaras dengan teori *fraud triangle* Cressey yang dikembangkan oleh Albrecht (2014:398) bahwa untuk memerangi *fraud* dapat dilakukan dengan cara menciptakan budaya yang etis di dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Artini (2014) menunjukkan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari (2015), Noviriantini (2015) & Rahmadani (2016) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah.

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu instansi, maka upaya penguatan sistem dalam hal pencegahan *fraud* yang dijalankan karyawan dapat ditingkatkan. Sebaliknya, apabila Instansi memiliki budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pemikiran logis yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H3: Budaya etis organisasi terbukti memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, dan H4: Budaya etis organisasi terbukti memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif dengan didasari paradigma positif. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini bersifat *explanatory* di mana penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap dua hingga lebih konstruk yang digunakan dengan berdasarkan pada hipotesis serta teori untuk pengujian suatu fenomena (Mulyadi, 2011).

Lokasi penelitian ini adalah kabupaten Lingga, kepulauan Riau. Adapun alasan dipilihnya Kabupaten Lingga sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten yang baru dimekarkan sekaligus menjadi kabupaten terbungsu di kepulauan Riau. Selain itu, dalam pelaksanaan program kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa yang masih terdapat celah-celah bagi oknum dalam pelaksanaannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh OPD yang berada di lingkungan kabupaten Lingga. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yakni *non-probability* yakni *purposive sampling*. Alasan dipilihnya *purposive sampling* dikarenakan tidak semua OPD melakukan kegiatan pengadaan serta melalui metode ini akan memberikan sampel yang lebih representatif terkait pengadaan. Adapun sampel pada penelitian ini secara spesifik adalah 10 OPD yang di dalamnya terdiri dari 55 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan pengadaan. Selanjutnya, unit analisis pada penelitian ini adalah pegawai yang berada di setiap OPD Pemkab Lingga yang memiliki peran dalam aktivitas pengadaan yang terdiri dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan.

Jenis data pada penelitian ini adalah data *cross-sectional*. Chandrarin (2017:122) menjelaskan bahwa data *cross-sectional* merupakan data yang nilainya diambil pada saat tertentu dengan atribut pengukuran tertentu. Sumber data pada penelitian ini yakni data primer, di mana data ini didapatkan secara langsung dengan memberikan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan menggunakan kuesioner yang kemudian disebarkan kepada responden yang telah ditentukan, yakni kepala dinas beserta jajaran pimpinan OPD Kabupaten Lingga. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah teknik survei dengan menggunakan kuesioner yaitu menggunakan daftar pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *moderated regression analysis*. MRA ini dipilih dikarenakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan dimoderasi oleh variable pemoderasi (Ghozali 2018:219).

Pencegahan *Fraud* merupakan upaya preventif yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan tujuan untuk menangkis serta meminimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya *fraud*. Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari instrumen yang diadopsi oleh Nuryanti (2015), adapun indikator tersebut di antaranya memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi, melimpahkan wewenang dan pemeriksaan.

Pengadaan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement* merupakan aktivitas pengadaan barang dan jasa yang meliputi sistem dan teknologi yang terintegrasi demi tercapainya pengadaan yang efektif dan transparan. Indikator yang digunakan merupakan indikator yang dikembangkan oleh Oemarmadi (2009), adapun indikator tersebut di antaranya adalah perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, pendaftaran & pengambilan dokumen, penyerahan penawaran, evaluasi, pengumuman calon pemenang dan sanggahan.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan rancangan sistem yang terdiri dari prosedur serta kebijakan yang kemudian diintegrasikan oleh manajemen guna memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai serta menjamin akan kelayakan proses yang dijalankan oleh manajemen. Variabel SPIP diukur berdasarkan indikator yang telah dikembangkan Purwitasari (2013), adapun indikator tersebut di antaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan.

Budaya etis organisasi merupakan suatu pemahaman terkait pandangan karyawan terhadap berbagai tindakan etis atasan yang memberikan perhatian lebih akan pentingnya etika pada organisasi yang berujung pada *reward* dan *punishment* atas setiap tindakan amoral. Variabel ini diukur berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Simbolon (2017) yang di antaranya pimpinan sebagai teladan, adanya kode etik, seminar kode etik, sanksi atas pelanggaran kode etik dan pengawas kode etik. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert di mana skala ini bertujuan untuk mengukur opini, sikap serta persepsi pada setiap individu hingga kelompok terkait fenomena sosial (Sugiyono, 2012:93). Secara keseluruhan frekuensi dari masing-masing indikator pertanyaan dari setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 1-5 yakni Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1; Tidak setuju (TS) diberi skor 2; Netral (N) diberi skor 3; Setuju (S) diberi skor 4; Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum dari data sampel yang diolah sesuai dengan variabel penelitian yang dipakai. Statistik deskriptif menunjukkan nilai *maximum*, *minimum*, *mean* dan *standard deviation*.

Dari hasil kuesioner yang diperoleh dengan jumlah responden sebanyak 55 orang, jawaban responden cukup bervariasi dengan skor jawaban responden untuk variabel pencegahan *fraud* (Y) berkisar antara 40 sampai dengan 50. Rata-rata untuk variabel ini adalah 47,76 dengan standar deviasi 2,645. Implementasi *e-procurement* ( $X_1$ ) memiliki skor berkisar 32 sampai dengan 40 dengan rata-rata 36,07 dengan standar deviasi sebesar 2,545. Untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah ( $X_2$ ), nilai terendah adalah 32, nilai tertinggi adalah 45 dan nilai rata-rata (*mean*) adalah 39,35 dengan standar deviasi sebesar 3,708. Selanjutnya untuk variabel budaya etis organisasi ( $X_3$ ) memiliki skor jawaban responden yang berkisar antara 19 sampai dengan 28, dengan rata-rata jawaban responden sebesar 23,36 dengan standar deviasi sebesar 2,222. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang

selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tingkat keberagaman nilai dan penyimpangan data pada penelitian ini relatif rendah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Pencegahan <i>Fraud</i>	55	40	50	47,76	2,645
Implementasi E-Procurement	55	32	40	36,07	2,545
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	55	32	45	39,35	3,708
Budaya Etis Organisasi	55	19	28	23,36	2,222

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi Pearson setiap butir pernyataan penelitian ini menunjukkan nilai skor total variabel pencegahan *fraud* (Y), implementasi *e-procurement* (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2) dan budaya etis organisasi (X3) menunjukkan nilai signifikansi pada tingkat signifikansi 0,01. Dengan demikian dapat bahwa setiap item indikator instrumen dalam penelitian ini valid. Selanjutnya terkait hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach alpha ( $\alpha$ ) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2018:46). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk masing-masing variabel reliabel.

Pengujian asumsi klasik pada dasarnya dilakukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik pada penelitian ini di antaranya melalui uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditandai dengan nilai *skewness* -1,56 dan *kurtosis* 0,69 yang pada dasarnya tidak melebihi syarat yang ditentukan yakni sebesar 1,96. Selanjutnya uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya etis organisasi memiliki nilai di atas 0,1. Sementara nilai *variance inflation factor* (VIF) memiliki nilai tidak lebih dari 10 yang kemudian dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui nilai signifikansi melalui uji Glejser yang harus mensyaratkan harus memiliki nilai sig di atas 0,05. Berdasarkan hasil uji Glejser diperoleh nilai sig sebesar 0,430 untuk variabel *e-procurement*, 0,400 untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan 0,280 untuk variabel budaya etis organisasi. Dengan kata lain tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini serta semua variabel indenpenden dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama atau homogen.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat *output* uji t (lihat Tabel 2). Jika nilai *p-value* kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesis pertama menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* artinya hipotesis

pertama diterima. Temuan ini mengindikasikan OPD kabupaten Lingga telah menerapkan *e-procurement* dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa OPD kabupaten Lingga niat yang sama dengan pemerintah dalam upaya mengentas korupsi pada proses pengadaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Danuta (2017), Artantri (2016), Faisol (2014), Udoyono (2012) dan Purwanto (2008) yang menemukan hal yang sama yakni implementasi *e-procurement* menyebabkan proses pelaksanaan pengadaan dapat berjalan secara adil serta tingkat kecenderungan kecurangan yang terjadi dapat menurun.

Tabel.2. Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	p-value	Keputusan
EP	2,892	0,006	H1 = Diterima
SPIP	2,995	0,004	H2 = Diterima
EP*BEO	2,345	0,023	H3 = Diterima
SPIP*BEO	2,119	0,039	H4 = Diterima

Temuan penelitian ini mendukung teori *fraud triangle* dan teori *gone* yang menyatakan bahwa peluang terjadinya kecurangan yang mencuat ke permukaan dapat diatasi melalui penerapan sistem berbasis elektronik dalam pelaksanaan pengadaan yang dikenal dengan *e-procurement*. *E-procurement* tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan transparansi akan tetapi juga meningkatkan efektivitas terkait alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Semakin baik *e-procurement* diimplementasikan dalam proses pengadaan maka usaha untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat ditingkatkan. Dengan demikian motivasi untuk melakukan tindakan menyimpang dapat menurun.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa hipotesis kedua juga diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian yang ada di OPD Kabupaten Lingga telah dijalankan dengan baik serta SPIP telah berjalan sesuai fungsinya yakni sebagai *controlling* dan *monitoring*. Indikasi tersebut berdampak pada menurunnya kecenderungan karyawan untuk melakukan kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), Yuliana (2016) dan Hermiyetti (2010) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut menyatakan bahwa melalui keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah maka berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan dapat ditekan.

Hasil temuan ini juga sejalan dengan teori *fraud triangle* dan teori *gone* yakni dengan adanya suatu sistem pengendalian internal di suatu instansi maka akan mampu mengatasi masalah kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Semakin optimal penerapan pengendalian internal di dalam suatu instansi akan cenderung semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Sebaliknya, jika kualitas sistem pengendalian internal tergolong buruk, maka hal itu akan menjadi sebab

munculnya kesempatan bagi pegawai untuk melakukan *fraud* pada pelaksanaan pengadaan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2016) dan Marlina (2012), di mana penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat interaksi antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Kondisi ini terjadi ketika lemahnya pengawasan dan proses dokumentasi yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal yang tidak optimal akan menyebabkan kerugian secara materil serta menghambat upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan pemerintah.

Hipotesis ketiga dan keempat menyatakan bahwa budaya etis organisasi merupakan variabel yang memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk efek moderasi didapatkan bukti empiris yang memaparkan bahwa interaksi antara implementasi *e-procurement* dan SPIP terhadap pencegahan *fraud* dengan dimoderasi budaya etis organisasi menunjukkan efek moderasi yang signifikan.

Bukti yang dihasilkan melalui pengujian secara empiris ini memberikan hasil yang sesuai dengan dugaan awal peneliti. Hasil uji hipotesis ketiga menghasilkan nilai  $p$  yang signifikan dengan koefisien yang lebih tinggi dibandingkan nilai koefisien sebelum moderasi. Artinya budaya etis organisasi memperkuat pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan dengan adanya budaya yang etis dan jujur di suatu organisasi dapat mendukung proses penerapan sistem aplikasi pada sektor pengadaan menjadi lebih efektif yang sekaligus menjadi fondasi dalam upaya pencegahan tindak kecurangan. Hasil pengujian hipotesis keempat juga menunjukkan adanya efek moderasi dengan ditandai nilai  $p$  yang signifikan. Artinya dengan mempertahankan budaya yang jujur dan beretika dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dalam mengawasi hingga menekan terjadinya perilaku menyimpang pada aktivitas pengadaan. Hal ini selaras dengan teori *fraud triangle* yang dinyatakan Karyono (2013:74) bahwasanya dalam rangka pencegahan *fraud* salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan dan mempertahankan budaya yang jujur serta beretika. Budaya etis yang ditanamkan dalam organisasi dalam konteks moral yakni baik dan buruk akan berdampak langsung pada motivasi seseorang untuk berperilaku. Dengan demikian semua pihak yang berada di organisasi harus mampu menjaga serta mempertahankan budaya yang beretika demi terlepas dari berbagai ancaman perilaku amoral yang mampu menyebabkan tidak tercapainya program-program serta tujuan organisasi.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini berfokus pada implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan sampel berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh ASN yang terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi *e-procurement* dan SPIP memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan pada proses

pengadaan. Sementara itu, budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem yang ada dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai referensi serta pertimbangan bagi pemerintah sebagai dasar untuk menerapkan aturan secara tertulis terkait penerapan budaya yang beretika dan jujur demi tercapainya pelaksanaan pengadaan yang terbebas dari kecurangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan serta saran yang dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis. Pertama, lokasi pada penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten yakni kabupaten Lingga. Hal tersebut menunjukkan dari sisi generalisasi penelitian masih tergolong lemah. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya perlu untuk menambah objek penelitian menjadi lebih dari satu kabupaten agar hasil penelitian secara keseluruhan dapat digeneralisasikan. Kedua, pengumpulan data membutuhkan rentang waktu yang cukup lama. Saran untuk penelitian selanjutnya terkait pengumpulan data sebaiknya tidak dilakukan pada akhir tahun yang pada dasarnya setiap OPD akan disibukkan dengan berbagai aktivitas anggaran akhir tahun. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada etika dan sistem dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan akibat lemahnya sistem. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan faktor-faktor seperti kompetensi pejabat hingga gaya kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan suatu organisasi demi mendukung sistem yang telah ada. Selain mendukung sistem yang telah diterapkan, melalui penambahan faktor juga diharapkan dapat memperkuat model penelitian menjadi lebih komprehensif untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Albercth, W.S. (2014). *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat
- Artantri, L. P. R. M. (2016). Peran *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis*. 10(1): 16-32
- Artini, N. L. E. A. (2014). Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. 2(1)
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Danuta, K. S. (2017). *Crowe's Fraud Pentagon Theory* Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Proses Pengadaan Melalui *E-Procurement*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2): 161-171
- Dewi, K. A. K. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Kas, Moralitas Individu, Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Kas (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng)
- Faisol, I. A. (2014). Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Sektor Publik. *JAFFA*, 02(2): 71-90
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Hermiyetti, H. (2010). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 14(2): 172-191
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lestari, K. A. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng. *E-Journal*, 3(1)
- Marlina. (2012). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengadaan Obat-Obatan Di Instalasi Farmasi Dan Distribusi Obat-Obatan Kepada Pasien (Study Kasus Pada Rumah Sakit Pertamina-Bintang Amin Bandar Lampung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(1):47-54
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15(1): 127-138
- Natasya, T. N. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Iv Polda Sulut. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2): 847-856
- Noviriantini, K. (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana) *E-Journal*, 3(1)
- Nuryanti, D. R. P. (2015). Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung
- Oemarmadi, S.(2009). *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan: *Indonesian Procurement Watch*.
- Purwanto, S. S. (2008). Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara *E-Procurement*. *Jurnal Teknik Sipil*. 9(1): 43-56
- Purwitasari, A. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang (Survei Pada 5 Rumah Sakit di Bandung). (Skripsi). Bandung: Universitas Widyatama.
- Rahmadani, P. (2016) Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Moralitas Aparat Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *E-Journal Bunghatta*, 9(1): 1-9
- Salim, M. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Analisis* 5(2):178-185
- Simbolon, D. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal Dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*. *JAAI*. 17(1): 57-74
- Sugiyono. (2012). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: LPFE UI

- Tuanakotta, T. M. (2012). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Udoyono, K. (2012). *E-procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. 3(1): 136-171
- Wicaksono, A. P. (2017) The Implementation of E-procurement System: Indonesia Evidence. *SHS Web of Conferences*. 34, 10004.
- Yakobustefa, S.A. (2013). Korupsi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik. *Jurnal NESTOR magister hukum*, 2(4): 256-271
- Yuliana, A. (2016). Pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (*Fraud*). (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Bank Syariahdi Kota Pekanbaru). *JOM Fekon* Vol 3 No 1: 1264-1278
- Zakaria, K. M. (2016). “*Internal controls and fraud – Empirical evidence from oil & gas company,*” *J. Finance. Crime*, 23(4) 1154-1168